ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU
MENURUT TEORI PROGRESIF
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST)

Kartika Cahyaningtyas
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
adv.cahya@gmail.com,

Artikel

Naskah dikirim : 21 April 2025
Naskah diterima : 12 Mei 2025
Naskah diterbitkan : 31 Juli 2025

Abstract

This research examines and analyzes judges' decisions regarding corruption crimes not charged in the indictment. This is analyzed from the perspective of progressive theory. Progressive law teaches, "law is for humans and society, not law for law." The statement that "law is for humans" implies that law is a means to bring happiness to humans. To serve humans well, the law cannot simply spell out statutory articles but must also operate with empathy and courage (dare). The essence of progressive law lies in progressive thinking and action that frees it from the shackles of legal document texts, because ultimately, law is not for legal texts, but for human happiness and well-being. The method used in normative research with a problem-solving approach is the case approach. The decision regarding corruption committed by Susi Tur Handayani, where the corruption in question was not charged in the indictment, can be categorized as a progressive decision. Judges are not merely mouthpieces of the law, viewing statutory regulations textually, but need to develop a deep understanding of the articles contained within those statutory regulations.

Keywords: Verdict, Indictment, Corruption Crime, Progressive Theory

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Korupsi menjadi topik yang terus diperbincangkan di antara masyarakat Indonesia. Korupsi bagaikan sudah menjadi budaya, sehingga sulit dikurangi bahkan sulit dihilangkan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah berupaya melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang terus diperbaiki, selain itu juga dibentuk lembaga independen yang berwenang untuk memberantas tindak pidana korupsi yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, seperti yang diketahui sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*, yang artinya peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi terus mengalami pembaharuan, namun penegakan hukumnya masih dirasa belum mencapai titik keadilan bagi masyarakat. Hal ini diperlihatkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi jauh dari tuntutan hukuman yang diajukan oleh Jaksa. Kenyataan lain yang lebih memprihatinkan adalah adanya gerakan mafia hukum dalam bentuk jual beli perkara dimana mempengaruhi moralitas penegak hukum dalam memberantas korupsi.

Fakta-fakta tersebut memberikan gambaran bahwa peraturan saja tidak cukup untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penegak hukum harus mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di bumi Indonesia. Para penegak hukum harus mempunyai keberanian apabila ingin memerangi korupsi. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun putusan bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pola pikir hakim yang berwenang menjatuhkan putusan tersebut harus pula senantiasa berkembang tidak hanya berkutat pada apa yang ditulis dalam peraturan, bukan sebagai “corong undang-undang”, namun mampu mengembangkan apa yang tertulis tersebut sehingga tercipta putusan yang pro-keadilan. Hal ini yang disebut dengan teori hukum progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa waktu lalu telah memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci. Susi Tur Andayani menjadi perantara pemberian uang Rp 1 miliar kepada M. Akil Mochtar dalam pengurusan sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak. Pemberian uang ditujukan supaya M. Akil Mochtar memenangkan keberatan yang

---

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. xiii

diajukan oleh pasangan Amir Hamzah dan Kasmin terhadap duet Iti Octavia Jayabaya - Ade Sumardi. Amir Hamzah lalu menunjuk Susi Tur Andayani sebagai pengacaranya. Susi memang dikenal lengket dengan M. Akil Mochtar, sebab merupakan mantan anak buahnya. M. Akil Mochtar dalam perkara sengketa itu menjadi Ketua Panel Hakim Konstitusi bersama dengan Maria Farida Indrati dan Anwar Usman.

Sedangkan dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan, Susi menjadi perantara pemberian uang Rp 500 juta dari pasangan terpilih Rycko Menoza dan Eky Setyanto. Dalam pengurusan sengketa itu Rycko memberikan uang Rp 300 juta kepada Eki dan Sugiarto kemudian diserahkan ke Susi di hotel Redtop Jakarta. Tetapi karena jumlah uang yang dijanjikan masih kurang, Susi kembali meminta uang kepada Eki dan Rycko yang akhirnya dipenuhi Eki dengan memberikan uang tunai Rp 100 juta dan Rycko memberikan cek Rp 100 juta kepada Susi. Setelah Rycko dan Eky memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi, maka pada 5 Agustus 2010, Susi mengirimkan uang Rp 250 juta ke rekening M. Akil Mochtar dengan keterangan "pembayaran kelapa sawit (Susi Tur Andayani)" sesuai arahan M. Akil Mochtar. Sisa uang dikirimkan pada 25 Oktober 2010, ke rekening CV Ratu Samagat yang dimiliki Ratu Rita Akil, istri M. Akil Mochtar, dengan keterangan "Pembayaran Tagihan".²

Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan: Kesatu, Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyangkut perkara Pemilukada Kabupaten Lebak; dan Kedua, Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyangkut perkara Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan.

Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mempertimbangkan bahwa pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dipandang kurang tepat diterapkan bagi Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat pasal-pasal dakwaan yang akan

---

² Isnaini, 2014, *Terbukti Jadi Perantara Suap Susi Tur Handayani Divonis 5 Tahun Bui*, terdapat dalam <http://news.okezone.com/read/2014/06/23/339/1002966/terbukti-jadi-perantara-suap-susi-tur-handayani-divonis-5-tahun-bui>, diakses pada tanggal 10 Maret 2025

diterapkan dan dibuktikan yang dipandang lebih sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Pertama, menyangkut perkara Pemilukada Kabupaten Lebak, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Dakwaan Kedua, menyangkut perkara Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Selanjutnya Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan yang telah disesuaikan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik membuat suatu kajian yang berjudul **“ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU MENURUT TEORI HUKUM PROGRESIF (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST)”**.

B. METODOLOGI

Penulis mengkaji pada rumusan yang telah penulis rumuskan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi, harmonisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum³. Bentuk penelitian ini adalah penelitian preskriptif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan saran-saran yang dapat dipergunakan apabila terdapat kasus yang sama dapat dicarikan proses penyelesaiannya yang sesuai dengan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari

---

³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 35

penjatuhan putusan oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan ditinjau menurut teori hukum progresif. Penulis menentukan sifat pada tulisannya yang bersifat *deskriptif*, karena memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Keadaan atau gejala yang dimaksudkan adalah penjatuhan putusan oleh hakim. Pendekatan yang penulis pilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Ditinjau Menurut Teori Hukum Progresif

Tindak pidana korupsi telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun dalam pembagian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pula tindak pidana korupsi suap. Tindak pidana korupsi suap sendiri dibedakan ke dalam tindak pidana korupsi suap aktif (memberi suap) dan tindak pidana korupsi suap pasif (menerima suap).

Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Susi Tur Andayani adalah tindak pidana korupsi suap aktif yaitu terdakwa menjadikan dirinya sebagai perantara untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, dalam kasus ini adalah Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, yang bertujuan untuk mempengaruhi putusan perkara Pemilukada Kabupaten Lebak maupun Pemilukada Kabupaten Lampung.

Tindak pidana korupsi suap pada Pemilukada Kabupaten Lebak dilakukan terdakwa melalui komunikasi telepon maupun pesan singkat dengan M. Akil Mochtar untuk mewakili pasangan Amir Hamzah-Kasmin agar dimenangkan permohonan perkara mereka. Terdakwa menyampaikan pesan kepada pasangan Amir Hamzah-Kasmin agar menyiapkan sejumlah uang guna diserahkan kepada M. Akil Mochtar. Uang yang akan diberikan kepada M. Akil Mochtar didapatkan atas bantuan Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, namun masih kurang dari jumlah yang diminta M. Akil Mochtar. Terdakwa belum sampai menyerahkan uang tersebut kepada M. Akil Mochtar, penyidik KPK telah menangkap terdakwa beserta uang suap di rumah orang tuanya.

Tindak pidana korupsi suap pada Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan dilakukan terdakwa dengan modus yang hampir sama dengan yang dilakukan terdakwa dalam perkara Pemilukada Kabupaten Lebak. Terdakwa yang ditunjuk oleh pasangan Rycko Menoza-Eki Setyanto sebagai kuasa hukum melakukan tindak pidana korupsi suap kepada M. Akil Mochtar. Saat terdakwa melakukan pertemuan dengan Rycko Menoza-Eki Setyanto dihubungi oleh M. Akil Mochtar untuk menyediakan sejumlah uang untuk permohonan perkara Pemilukada Kabupaten Lampung Selatan. Uang yang diberikan kepada M. Akil

Mochtar dikirim melalui bank secara bertahap. Tahap I dikirim melalui rekening BNI kepada M. Akil Mochtar dengan tujuan seolah-olah untuk pembayaran kelapa sawit. Tahap II dikirim melalui aplikasi setoran tunai Bank Mandiri kepada Ratu Rita (istri M. Akil Mochtar) dengan penulisan berita pembayaran tagihan.

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, penuntut umum menyusun surat dakwaan Nomor: 05/24/02/2014 tanggal 11 Februari 2014 berupa dakwaan kumulatif, dengan dakwaan pertama dan dakwaan kedua Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan yang disusun oleh penuntut umum menunjukkan bahwa penuntut umum menempatkan diri terdakwa sejajar dengan M. Akil Mochtar, sebagai hakim. Hal ini seperti yang tertuang dalam uraian Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, hakim akan membuat putusan, yang isinya berupa pernyataan hakim yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Putusan hakim dalam perkara pidana, terbagi ke dalam tiga jenis putusan yaitu:

1. Putusan pembebasan dari tindak pidana atau *vrijspraak*, apabila menurut hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHP);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslaag van alle rechtsvervolging*, apabila perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP);
3. Putusan pemidanaan, apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Mengutip pendapat Moelyatno, proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selanjutnya, Moelyatno

menyatakan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam hal analisis hakim terhadap pelaku tindak pidana, ternyata sehat lahir dan batinnya, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku maka hakim menyatakan pelaku sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

3. Tahap penentuan pembedaan

Jikalau hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku. Maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh si pelaku.⁴

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga dalam putusan hakim berisikan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Pada tahap penentuan putusan pengadilan, secara normatif yuridis, penerapan asas hakim aktif mendapatkan legitimasi yuridis berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yaitu persyaratan terbuktinya suatu perbuatan atau peristiwa pidana, yang tercakup dalam asas minimum pembuktian. Suatu tindak pidana dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang (Penjelasan Pasal 183 KUHAP). Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Uraian mengenai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti, termaktub dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP.

---

⁴ Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo, 2005, hlm. 85-92

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya adanya keyakinan pada hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Keyakinan hakim turut mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keyakinan hakim merupakan bagian tersembunyi dalam membuat suatu putusan. Banyak hakim yang secara terbuka mengakui bahwa keyakinan hakim memberikan dampak terhadap putusan yang dibuatnya, yang mana seringkali tidak disadari dan tidak dapat dijelaskan.⁵

Dalam konteks hukum pidana, mengadili suatu perkara bukanlah hal mudah. Selain berpegang pada alat bukti yang sah, hakim harus mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Hal ini adalah konsekuensi dari sistem pembuktian yang dianut yaitu negatif wettelijk bewijs theorie atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya, hakim memutus perkara haruslah berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tegas melarang untuk menjatuhkan pidana, jika berdasarkan bukti minimum tidak menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa bersalah.⁶

Terdapat tiga nilai dasar dari hukum yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan kaidah hukum yaitu kepastian hukum (*recstssicher heit*), kemanfaatan (*zweckmassiheit*) dan keadilan (*gerecghttigkeits*) dari Gustav Radburch. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistik, selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Selanjutnya Radburch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.⁷

Tindakan hukum oleh penegak hukum dengan memperhatikan ketiga nilai dasar hukum tersebut diharapkan akan mampu menciptakan iklim yang baik dalam proses penegakan hukum pidana, yang berarti juga akan mendapat simpati masyarakat luas,

---

⁵ John N. Drobak & Douglas C. North, "Understanding Judicial Decision-Making: The Importance of Constraints on Non-Rational Deliberations" dalam *Journal of Law & Policy*, Vol. 26, 2008, Washington: Washington University, hlm. 138

⁶ Eddy O.S Hiariej, "Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 No. 1 Januari 2013, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 60

⁷ Achmad Ali, 1993, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Partama, Jakarta, 1993, hlm. 96

karena dengan demikian masyarakat akan menyadari betapa pentingnya hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari.⁸

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana dapat mengacu pada rumusan Pasal 55 dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2013. Faktor yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan ialah:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Seorang hakim juga harus mempertimbangkan penjatuhan putusan pemidanaan berdasarkan beberapa aspek tujuan hukum sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari;
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.⁹

Berdasarkan hal-hal yang terbukti di persidangan, hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Susi Tur Andayani telah melakukan tindak pidana korupsi suap. Namun tindak pidana yang disimpulkan oleh hakim tidak terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Pasal yang dipandang hakim sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ialah Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31

---

⁸Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa", dalam Jurnal Media Hukum, Vol. 19 No. 1 Juni 2012, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 93

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 112

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan pemidanaan dengan berdasarkan pasal yang diterapkan oleh hakim bukan mempunyai maksud untuk pembalasan atau untuk menyakiti terdakwa. Putusan pemidanaan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan bagi diri terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana. Hal itu dipandang sebagai salah satu upaya hakim dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi suap hakim dengan Terdakwa Susi Tur Andayani dapat dikategorikan sebagai suatu putusan progresif. Karakteristik daripada metode penemuan hukum progresif merupakan penemuan hukum yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.¹⁰

Sejalan dengan pengertian penemuan hukum yang progresif di atas, maka putusan hakim yang sesuai dengan penemuan hukum progresif ialah:

1. Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) meskipun memang seharusnya hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan.
3. Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran ke depan (*visioner*), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), dimana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
4. Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan

---

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 137

¹¹ *Ibid.*, hlm. 137-138

titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut 'ideologi': hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.¹²

Paradigma hukum untuk manusia mensyaratkan agar cara bernegara hukum didorong untuk tidak linier melainkan progresif dan bermakna. Hukum untuk manusia meninggalkan cara berhukum yang hanya didasarkan pada olah pikir atau logika yang linier, dan mengoreksinya dengan cara berhukum yang mengejar makna kemanusiaan dari hukum. Relevansinya dengan praksis bernegara hukum adalah sewaktu-waktu kita perlu berani membebaskan diri dari logika teks yang linier demi mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih tinggi, yaitu menjadikan negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan bagi seluruh rakyat.¹³

Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹⁴ Dalam sistem hukum dimanapun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.¹⁵

"*Sejatine ora ana apa-apa, kang ana iku dudu*" (artinya: sesungguhnya tidak ada apa-apa, yang tampak ada itu bukan yang sesungguhnya), demikian teori kuantum ala Jawa sebagaimana sering dikemukakan oleh Prof. Satjipto Rahardjo, begawan hukum penggagas Teori Hukum Progresif.¹⁶ Profesor Satjipto dengan pendekatan hukum progresif bertujuan mewujudkan alternatif bagi pendekatan dominan dalam interpretasi hukum di Indonesia, yaitu pendekatan yang dianggap formalis dan kurang memperhatikan substansi keadilan. Menurut Professor Satjipto, kepastian hukum terlalu 'didewakan' padahal seharusnya hukum lebih 'manusiawi'.¹⁷

Teori hukum progresif, tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo yang galau dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan-persoalan

¹² Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan III, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 212

¹³ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 94-95

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 270

¹⁶ Suteki, "Budaya Oriental dan Implikasinya Terhadap Cara Berhukum dalam Perspektif Hukum Progresif", dalam Dinal Fedrian, dkk (ed) *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 253

¹⁷ Adriaan Bedner, "Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum", dalam *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta, 2011, hlm. 139-140

hukum muncul dalam nuansa transisi, namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru. Yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*), tetapi juga dipermainkan sebagai 'barang dagangan' (*business-like*). Akibatnya, hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serius. Dari sinilah Profesor Satjipto menyuarakan perlunya hukum progresif.¹⁸

Kata progresif berasal dari *progress* yang berarti adalah kemajuan. Hukum diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁹ Hukum progresif mengajarkan, "hukum adalah untuk manusia dan masyarakat, bukan hukum untuk hukum". Pernyataan hukum adalah untuk manusia mengandung arti bahwa hukum adalah sarana untuk membahagiakan manusia. Untuk bisa melayani manusia dengan baik, maka hukum tidak bisa hanya mengeja pasal undang-undang, melainkan juga bekerja dengan modal empati dan keberanian (*dare*).²⁰

Satjipto Rahardjo mengkritik pengadilan yang terisolasi atau dengan ungkapan lain sebagai corong undang-undang. Semangat liberal dan legalisme-positivistik yang sangat kuat di abad ke-19 itu memberikan landasan teori bagi munculnya pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat. Cara berpikir positif-tekstual yang kurang lebih hanya "mengeja" suatu peraturan, memang amat mudah, tetapi dangkal. Satjipto Rahardjo mengingatkan kembali pendapat Paul Scholten, seorang pemikir hukum Belanda, yang mengatakan, "hukum itu ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan".²¹

Satjipto Rahardjo berpendapat; "Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu mengabdikan kepada manusia dan masyarakat. Berangkat dari situ maka menjalankan hukum tidak dapat dilakukan secara matematis atau dengan cara "mengeja pasal-pasal undang-undang."²² Hukum yang progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan sebagainya. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi.²³

---

¹⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *Loc. Cit.*

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Ibid.*, hlm. 228

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir .....*, *Ibid.*, hlm. 107

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Ibid.*, hlm. 56

²² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir .....*, *Ibid.*, hlm. 87

²³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, dalam Majalah Hukum Newsletter No. 59, Yayasan Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004, hlm. 1

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.²⁴

Hukum progresif, tidak sekali-kali menafikan peraturan yang ada. Meski begitu, ia tidak seperti legalisme yang mematok peraturan sebagai harga mati yang hanya berkuat pada proses logis formal. Hukum progresif merangkul, baik peraturan maupun kenyataan/kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan.²⁵

Hal terakhir yang perlu disinggung, adalah kedudukan diskresi dalam hukum progresif. Dalam konteks diskresi, para penyelenggara hukum dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral daripada ketentuan-ketentuan formal.²⁶

Menghadapi kondisi transisional di mana persoalan saling berhimpitan, serba darurat, dan penuh komplikasi, maka aparat penegak hukum dituntut melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum, tidak sekedar menerapkan peraturan secara hitam-putih. Ini penting dilakukan karena banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman, terhampar begitu banyak kenyataan dan persoalan kekinian yang secara redaksional sulit ditemukan dalam teks-teks aturan yang ada. Karena itu, kehadiran pelaku hukum yang arif, visioner, dan kreatif mutlak perlu untuk “memandu” pemaknaan yang kreatif terhadap aturan-aturan tersebut. Aparat penegak hukum, entah polisi, jaksa, maupun hakim dituntut mencari dan menemukan keadilan-kebenaran dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Inilah inti terobosan dalam hukum progresif.²⁷

Agar terwujud suatu penegakan hukum yang progresif, maka dibutuhkan hukum progresif. Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.²⁸ Dalam perkembangannya, setidaknya dapat diidentifikasi beberapa karakter hukum progresif yang diharapkan menjadi tipe hukum yang mampu memberi jalan bagi

---

²⁴ Bernard L. Tanya, dkk, *Ibid.*, hlm. 213

²⁵ *Ibid.*, hlm. 214

²⁶ *Ibid.*, hlm. 216

²⁷ *Ibid.*, hlm. 217-218

²⁸ Yohanes Suhardin, “Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum”, dalam *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, hlm. 346

pembangunan hukum di Indonesia di masa yang akan datang, yaitu hukum progresif menganut paradigma:²⁹

1. Hukum diciptakan untuk kesejahteraan manusia;
2. Pluralism hukum;
3. Sinergi atas kepentingan pusat dan daerah;
4. Koordinasi; dan
5. Harmonisasi hukum.

Asas yang menjadi dasar penerapannya adalah:³⁰

1. Asas persatuan;
2. Asas kesamaan derajat;
3. Asas desentralisasi;
4. Asas otonomi; dan
5. Asas fungsional.

Hukum progresif tidak berpikir semata-mata menurut “*legal way*” tetapi lebih daripada itu menurut “*reasonable way*”. Apabila terjadi kebuntuan, maka hukum progresif melakukan cara alternative yang kreatif, di atas menjalankan hukum “*to the letter*”. Hukum yang menyejahterakan dan membahagiakan masyarakat hanya akan tercapai jika kembali membaca dengan cermat konstitusi dasar yaitu UUD NRI 1945. Hukum progresif adalah suatu sistem hukum yang berkembang secara progresif untuk beradaptasi dengan tuntutan perkembangan kehidupan yang dalam alam empiriknya tak bisa disangkal, ialah perkembangan yang disebut globalisasi.³¹

D. PENUTUP

Simpulan

Penjatuhan putusan tindak pidana korupsi yang dilakukan Susi Tur Handayani, dimana tindak pidana korupsi yang dimaksud tidak didakwakan dalam surat dakwaan dapat dikategorikan sebagai putusan yang progresif. Hakim tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang, yang memandang peraturan perundang-undangan secara tekstual, namun perlu melakukan pemahaman mendalam terhadap pasal-pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum untuk manusia meninggalkan cara berhukum yang hanya didasarkan pada olah pikir atau logika yang linier, dan mengoreksinya dengan cara berhukum yang mengejar makna kemanusiaan dari hukum. Relevansinya dengan praksis bernegara hukum adalah sewaktu-waktu kita perlu berani membebaskan diri dari logika teks yang linier demi mencapai tujuan kemanusiaan yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 347

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 348

lebih tinggi, yaitu menjadikan negara hukum sebagai rumah yang membahagiakan bagi seluruh rakyat.

Hukum progresif mengajarkan, “hukum adalah untuk manusia dan masyarakat, bukan hukum untuk hukum”. Pernyataan hukum adalah untuk manusia mengandung arti bahwa hukum adalah sarana untuk membahagiakan manusia. Untuk bisa melayani manusia dengan baik, maka hukum tidak bisa hanya mengeja pasal undang-undang, melainkan juga bekerja dengan modal empati dan keberanian (*dare*). Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Saran

Dari hasil kajian ini Penulis akan mengemukakan saran bagi pihak yang bersangkutan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang berguna di kemudian hari, adapun saran dari penulis adalah :

1. Hakim sebagai pejabat peradilan yang diberi wewenang untuk mengadili harus memperhatikan norma-norma maupun aturan-aturan perundang-undangan terkait proses peradilan. Namun seorang hakim dalam melakukan penyusunan putusan harus tetap melakukan pemahaman mendalam terhadap kasus maupun pasal peraturan perundang-undangan sehingga tercipta putusan yang pro-keadilan, bukan hanya sekedar produk formalitas perundang-undangan.
2. Putusan yang diambil oleh hakim selain mencerminkan kepastian hukum, juga harus sekaligus mencerminkan keadilan maupun kemanfaatan bagi rakyat yang merupakan pemangku kepentingan.
3. Penegakan hukum progresif bukan hanya menjadi pekerjaan hakim namun juga seluruh aparat penegak hukum, sehingga hukum yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dapat tercapai.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 1993. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Partama.
- Adriaan Bedner. 2011. “Suatu Pendekatan Elementer terhadap Negara Hukum”, dalam Myrna A Safitri, dkk (ed). *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema Institute.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya, dkk. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan III. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Isnaini. 2014. *Terbukti Jadi Perantara Suap, Susi Tur Handayani Divonis 5 Tahun Bui*.
<http://news.okezone.com/read/2014/06/23/339/1002966/terbukti-jadi-perantara-suap-susi-tur-handayani-divonis-5-tahun-bui> , diakses tanggal 10 Maret 2025
- Journal of Law & Policy Vol. 26 2008.
- Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 No. 1 Januari 2013.
- Jurnal Media Hukum Vol. 19 No. 1 Juni 2012.
- Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21 No. 2 Juni 2009.
- Satjipto Rahardjo. 2004. *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*. Majalah Hukum Newsletter No. 59. Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum.
- _____. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- _____. 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.